#### **BAB IV**

#### **PENUTUP**

# 4.1 Kesimpulan

## 4.1.2 Penerapan Pelayan Kesehatan Puskesmas Batin XXIV Batanghari

Kesehatan merupakan hak asasi setiap manusia, setiap individu, setiap keluarga, dan setiap masyarakat berhak atas perlindungan kesehatan. Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk mengatur dan melindungi hak atas kesehatan masyarakat yang optimal. Tanggung jawab negara adalah menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai dan mudah diakses oleh warganya. Puskesmas Batin XXIV sebagai Instansi yang menangani permasalahan ditingkat Kecamatan Harus sigap dalam mengatasi masalah yang ada. Untuk itu mereka bisa berpedoman pada Permenkes No 43 Tahun 2019, namun dalam pengimplementasiannya, terdapat beberapa indikator yang bermasalah, yakni komunikasi dan sumber daya sehingga menghambat kinerja puskesmas.

### 4.1.2 Pelayan Publik Puskesmas

Dalam melakukan pelayanan puskesmas Batin XXIV telah menjalankan tugasnya meskipin ada beberapa prinsip playanan publik yang masih perlu diperhatikan yakni: respon terhadap masyarakat dan fasilitas yang masih perlu dibenahi dan dilengkapi, agar dapat memaksimalkan pelayanan. Apabila hal ini bisa diselesaikan dan diterapkan dengan baik sesuai dengan Permenkes No 43 Tahun 2019 maka tentunya Kinerja Instansi ini akan terus maju.

### 4.2 Saran

Dalam menjalankan tugasnya sebagai instansi yang bergerak dibidang kesehatan untuk melayani masyarakat. Puskesmas harus berpedoman pada salah peraturan yakni Permenkes No 43 Tahun 2019. Namun dalam pengimplementasiannya masih belum maksimal. Seharusnya pihak puskesmas bisa meminta saran kepada dinas kesehatan maupun kepada DPRD yang ada tentang menangani permasalahan seperti:

# **4.2.1** Kekurangan fasilitas

Hal ini bisa diatasi dengan adanya koordinasi dengan dinas kesehatan, anggota Dprd Kabupaten Maupun Pihak Investor swasta. Mereka bisa bekerja sama dengan pihak swasta yang menyediakan fasilitas dengan harga standar dan memiliki bonus melimpah dengan tetap mengutamakan standarisasi obat yang sesuai BPOM dan fasilitas penunjang SNI. Selanjutnya pihak Puskesmas meminta Persetujuan Dari Dinas Kesehatan agar dapat menjalankan hal tersebut.

# **4.2.2** Bagaimana cara mengembangkan potensi petugas kesehatan

agar dapat memaksimalkan kinerja pegawainya Pimpinan Puskesmas bisa melakuka pengembangan potensi melalui Pelatihan mengenai peningkatan kualitas layanan kesehatan maupun dengan cara mengadakan seminar motivasi. Selain itu mereka yang telah bekerja keras diberikan reward berupa kenaikan gaji, pangkat ataupun hal yang lainnya agar dapat membuat para karyawan semngat dalam bekerja. Apabila puskesmas memperhatikan kesejahteraan pegawai maka mereka akan loyalitas kepada instansinya.